

Hukum

Temuan Rp 8 Miliar, Bentuk Majelis Tuntutan

SINTANG. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalbar atas aliran dana Rp 8 Miliar yang tidak dipertanggungjawabkan anggota DPRD Sintang periode 2004-2009, terus ditindaklanjuti. Inspektorat Kabupaten Sintang membentuk Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

"Ini menyangkut kerugian Negara, memang harus dipertanggungjawabkan," ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang, Drs A Tilla M.Si saat dikonfirmasi Equator, Minggu (24/4) kemarin.

■ Halaman 7

Temuan Rp 8 Miliar

Tilla mengatakan, Inspektorat Kabupaten Sintang telah membentuk Majelis Ganti Rugi. Majelis ini sejenis tim, diketuai Sekda, terdiri dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dan Inspektorat.

"Tim ini akan menindaklanjuti temuan itu. Caranya, dengan proses pengembalian," ujar Tilla.

"Dewan yang bersangkutan berkewajiban mengembalikan dana itu ke kas Negara. Mekanisme pengembalian bisa melalui DPPKA yang disertai dengan bukti penyetoran," tambah Tilla.

Temuan BPK Perwakilan Kalbar ini mengindikasikan adanya kerugian negara. Namun menurut Tilla, sebelum menyelesaikan persoalan itu, harus ada pemilahan terlebih dahulu berkaitan dengan hasil temuan yang dilakukan BPK. "Harus ada pemilahan. Alasannya, temuan senilai Rp 8 Miliar terdiri dari beberapa bagian dan masing-masing persoalan berbeda," ucapnya.

Temuan pertama, menyangkut dana Otonomi Daerah (OTDA). Temuan ini sekarang sudah dilimpahkan ke pengadilan dan masih dalam proses. "Temuan ini sudah ada yang menanganinya. Kita tunggu saja hasilnya bagaimana," tukas Tilla.

Temuan kedua, berkenaan dengan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI). Dalam persoalan ini, Tilla menganggap Dewan hanya korban aturan.

Alasannya, ada aturan yang saling bertentangan tentang penggunaan dana tersebut.

"Istilahnya, di satu sisi diperbolehkan, di sisi lain tidak. Ini juga masalah nasional, seluruh Indonesia, kemungkinan besar akan dikaji ulang. Kita belum tahu pasti bagaimana penyelesaian akhir. Yang jelas mereka (Dewan, red) diminta mengembalikannya," beber Tilla.

Temuan ketiga, menyangkut dana asuransi yang ada di pihak ketiga. "Waktu itu salah posnya. Harusnya tidak bisa melalui dana APBD karena ada di sekretariat dewan. Tapi persoalan ini sudah kita coba selesaikan dengan cara memfasilitasi dewan yang ada sekarang dengan BPK," terang Tilla.

Adapun temuan terakhir, ke empat, menyangkut perjalanan dinas. "Kalaupun bermasalah, dana ini yang menjadi masalah ke depan. Kalau yang lain bisa kita selesaikan mengacu pada pertemuan Jumat minggu lalu dengan BPK," jelas Tilla.

Disinggung mengenai beberapa besar jumlah kerugian Negara terkait temuan perjalanan dinas? Tilla berasumsi bila dana itu tidak terlalu besar. "Saya tidak bisa menyebutkan besarnya. Tapi bila dilihat dari empat temuan itu, bisa dikukulkan untuk perjalanan dinas sekitar Rp 2 Miliar," terangnya.

Berkaitan dengan temuan perjalanan dinas itu, Tilla mengaku cukup kesulitan menanggapinya. "Soal perjalanan dinas ini beberapa kalangan dewan

ada yang sudah meninggal, dan sebagainya sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik lantaran pikun. Yang seperti ini mungkin diselesaikan melalui ahli waris," terangnya.

Anggota DPRD Sintang Wiwin Erlias SP yang menjabat dua periode dari 2004-2009 dan 2009-2014 dikonfirmasi terkait temuan perjalanan dinas, tidak menampik hal itu. Namun menurutnya, temuan perjalanan dinas itu bukan masuk pada kalangan dewan periode 2004-2009, melainkan dewan periode 1999-2004.

"Sesuai hasil pemutakhiran data yang saya dapat, hanya ada tiga temuan yakni menyangkut dana OTDA, TKI dan asuransi. Dari tiga itu, temuan dana TKI ada pada dewan periode 2004-2009. Tapi setahu saya beberapa dewan sudah mengembalikannya dan lainnya menyicil. Kalau soal perjalanan dinas itu masuk dalam temuan dana OTDA," terang

.... dari halaman 1

Wiwin.

Sekretaris DPRD Sintang (Sekwan), Drs Murjono dikonfirmasi terkait temuan BPK Perwakilan Kalbar enggan berkomentar banyak. Namun menurutnya, berkaitan dengan dewan dari tahun 2008, 2009 hingga sekarang tidak ada masalah. "Yang jelas dari 2008 hingga sekarang tidak ada masalah. Kalau soal dewan lama, waktu itu saya masih menjabat asisten 1 di pemerintahan," pungkasnya. (din)